

PENGUATAN KELEMBAGAAN KAMPUNG IKLIM TOBEKGODANG KOTA PEKANBARU TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM

Afni Z¹, Fara Merian Sari², Prihati³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Indonesia
afni@unilak.ac.id¹, Fara.meriansari@yahoo.com², Prihati.prihati@yahoo.com³

ABSTRAK

Abstrak: Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk menguatkan kelembagaan kampung iklim Kelurahan Tobekgodang, dan membuka akses dukungan kebijakan proklam dari pemerintah. Metode kegiatan dengan sosialisasi secara luring dan daring, pendampingan administratif, dan pelatihan bantuan Proklam. Dari hasil kegiatan pengabdian ini terjadi peningkatan eksistensi kelembagaan kampung Iklim Kelurahan Tobekgodang, peningkatan kapasitas kelembagaan Proklam setelah mendapat dukungan prasarana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, peningkatan kemampuan SDM serta manfaat yang dapat langsung diaplikasikan untuk membentuk masyarakat berketahanan iklim di tingkat tapak.

Kata Kunci: *Penguatan Kelembagaan; Kampung Iklim; Kebijakan Perubahan Iklim*

Abstract: *Efforts to mitigate and adapt to climate change in Indonesia are still constrained by the climate village institutional program (Proklam) at the site level. The purpose of this community service is to strengthen the climate village institution of Tobekgodang Village, and to open access to pro-climate policy support from the government. Methods of offline and dare socialization activities, administrative assistance, and training for Proklam assistance. From the results of this service activity, there was an increase in the existence of the Climate Village institution, Tobekgodang Village, the increase in the institutional capacity of Proklam after receiving the support of climate change mitigation and adaptation infrastructure, increasing the capacity of human resources and benefits that can be directly applied to form a climate-resilient community at the site.*

Keywords: *Institutional Strengthening; Climate Village; Climate Change Policy*



Article History:

Received: 21-06-2021

Revised : 27-06-2021

Accepted: 28-06-2021

Online : 01-08-2021



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Perubahan iklim sudah menjadi isu global dan diterjemahkan ke dalam banyak kebijakan nasional Indonesia (Afni, 2021). Dalam praktik untuk pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen pada 2030 dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional, memerlukan kerja lintas sektor melibatkan peran pemerintah, swasta ataupun masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Legionosuko et al., 2019). Program kampung iklim (Proklam) menjadi salah satu modal dasar di tingkat tapak untuk perumusan langkah-langkah tersebut (Perdinan, 2020). Karena kegiatan

Proklam terdiri dari adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (Mashur & Meiwanda, 2019).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan Proklam sebagai gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas masyarakat (Faedulloh et al., 2019), tujuannya untuk membentuk masyarakat berketahanan iklim. Konsep perubahan iklim sendiri bagi keekonomian nasional sangat penting dibangun dari tiga arah, yakni Desa, kehutanan dan perkebunan (Bambang Sueprijanto, 2014)

Proklam memberikan apresiasi terhadap wilayah administratif paling rendah setingkat RW/dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan/desa. Selain itu juga mencakup wilayah komunitas seperti pondok pesantren, perguruan tinggi, dan lain-lain. Landasan kebijakan Proklam adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.84/MenLHK-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, dan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Ghina & Zunariyah, 2017).

Mitra pengabdian ini adalah Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru yang telah memperoleh Sertifikat Proklam Utama dari KLHK tahun 2020, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri LHK Nomor 401/MENLHK/PPI/PPI.0/10/2020 tentang Penerima Penghargaan Proklam tertanggal 19 Oktober 2020. Di Indonesia baru terbentuk 2.775 kampung iklim, sedangkan di Provinsi Riau, baru ada 14 desa dan kelurahan yang menerima penghargaan Proklam. Khusus di Kota Pekanbaru, hanya diterima Kelurahan Tobekgodang.

Namun begitu Lurah Tobekgodang dan jajarannya selaku penggerak Proklam masih mengalami persoalan pada lemahnya kelembagaan. Hal ini terlihat dari masih belum berjalannya koordinasi kegiatan mitigasi dan adaptasi Proklam secara kolektif di tingkat RT/RW pada kelurahan tersebut. Kondisi ini relevan dengan kajian terdahulu bahwa faktor kelembagaan menjadi salah satu masalah, karena masih kurangnya koordinasi antara RT/RW dan pemerintah kelurahan, serta masih kurangnya pembinaan dari pemerintah di tingkat lebih tinggi seperti tidak adanya pendampingan dalam bentuk pelatihan yang berhubungan dengan birokrasi dan administrasi pemerintahan (Zuhdi et al., 2020). Pendampingan sangat diperlukan agar masyarakat bisa mendapatkan akses terhadap kebijakan pemerintah (Afni.Z, Sari F Merian, 2021).

Banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program kampung iklim (Sudarwanto et al., 2021), misalnya masyarakat biasanya cenderung hanya mau terlibat, bilamana mereka mendapatkan keuntungan langsung (Krisnawansyah et al., 2018). Selain itu ada budaya masyarakat, norma, dan gotong royong, faktor kepemimpinan di tingkat lokal, dan keseriusan pemimpin di tiap tingkatan yang menjadi penggerak masyarakat (Mardika et al., 2018). Atas dasar

itulah penguatan kelembagaan diperlukan agar akses masyarakat terhadap kebijakan dapat terbuka, sehingga dapat meningkatkan kinerja kampung iklim Tobekgodang memberikan kontribusi perubahan iklim di tingkat tapak.

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk: 1) Penguatan kelembagaan Proklam di Kelurahan Tobekgodang. Hal ini sejalan dengan data dari Direktorat Pengendalian Perubahan Iklim KLHK yang menyatakan bahwa kendala pencapaian target terbentuknya 20.000 kampung iklim di tahun 2024, salah satunya berasal dari masih lemahnya aspek kelembagaan Proklam di tingkat tapak. Dengan adanya pendampingan diharapkan para pihak dapat meningkatkan kemampuannya secara administratif saat mengisi Sistem Registri Nasional (SRN) PPI KLHK. 2) Pengembangan keterampilan dan kompetensi SDM, serta menguatkan jalinan keluar (*development and strengthening of external link*), sehingga mendapatkan manfaat dari kemitraan yang berlangsung secara intensif. (R. Renaldo Manalu & Bhayu Rhama, 2021).

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Kampung Iklim Tobekgodang dilakukan secara bertahap dengan beberapa metode. Diantaranya dengan menggelar sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka terbatas (luring) dengan menerapkan protokol kesehatan.

Dilanjutkan dengan pendampingan penguatan kelembagaan secara daring atau *online*, dengan penyelenggara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning. Dilanjutkan dengan pendampingan penguatan kelembagaan secara administratif untuk akses kebijakan bantuan Proklam. Selain itu juga dilakukan pelatihan untuk bantuan peralatan Proklam. Total waktu pelaksanaan selama lebih kurang tiga bulan (Maret-Mei 2021).

Pelaksana kegiatan ini adalah tim pengabdian yang terdiri dari Dosen-dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning, dibantu kalangan mahasiswa dan berbagai komunitas di Kota Pekanbaru. Dukungan kegiatan diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Adapun tahapan pelaksanaan pengabdian meliputi:

1. Melakukan observasi atau pengamatan langsung ke Kelurahan Tobekgodang, dan melakukan sosialisasi kegiatan pengabdian masyarakat dengan Lurah Tobekgodang selaku pengerak Kampung Iklim.
2. Kegiatan Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Proklam. Kegiatan ini dilakukan dua kali, secara langsung tatap muka dengan mengundang perangkat Kelurahan dan RW/RT. Dilanjutkan dengan sosialisasi secara daring Proklam dengan melibatkan mahasiswa, Pemda, LSM dan berbagai komunitas.
3. Pendampingan penguatan kelembagaan secara administratif

4. Pelatihan dan penyerahan bantuan Proklamasi
5. Monitoring dan evaluasi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Observasi dan Sosialisasi

Kegiatan diawali dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung ke Kelurahan Tobekgodang, pada tanggal 14 Maret 2021. Dalam kegiatan ini dilakukan wawancara mendalam dengan Lurah Tobekgodang selaku tokoh penggerak Proklamasi di wilayah administratif yang memiliki 15 RW dan 17 RT dengan jumlah KK 5.861 dan 26.086 jiwa penduduk.

Dari kegiatan ini didapat informasi persoalan yang dihadapi Kampung Iklim Tobekgodang, yakni kurang kuatnya kelembagaan Proklamasi menjadikan kegiatan ini hanya berjalan secara swadaya terbatas dan tanpa ada bantuan sarana prasarana dari pemerintah. Ini akan menjadi kendala Kelurahan Tobekgodang naik tingkat dari mendapat sertifikat ke trophy Proklamasi.

Selain itu dilakukan sosialisasi terkait kegiatan pengabdian masyarakat, dan disepakati beberapa agenda lanjutan selama masa pengabdian untuk penguatan kelembagaan Proklamasi. Kegiatan observasi dan sosialisasi sebagaimana terlihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Observasi dan sosialisasi kegiatan pengabdian masyarakat bersama Lurah Tobekgodang dan kelompok tani

2. Sosialisasi Penguatan Kelembagaan

Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Dihadiri 28 orang terdiri dari perangkat Kelurahan, RW/RT, mahasiswa dan komunitas masyarakat. Selain itu kegiatan yang berlangsung hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 di Tobekgodang ini dihadiri Kabid Proklamasi Dinas LHK Provinsi Riau, dan Plt Kepala BPDASHL Indragiri Rokan KLHK. Adapun pembahasan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah:

- a. Melakukan penguatan kelembagaan Proklamasi hingga ke tingkat RW dan RT Kelurahan Tobekgodang, minimal untuk mendapatkan sertifikat Proklamasi pada tahun berikutnya
- b. Perangkat RW dan RT masih belum mengetahui kerja administratif mengisi SRN-PPI sebagai basis data untuk legalitas Proklamasi

- c. Menyikapi masalah tersebut, maka akan dilaksanakan sosialisasi lanjutan secara *daring* dengan melibatkan narasumber dari Ditjen PPI KLHK.

Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan berbagai dukungan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, diantaranya 5.000 bibit sirsak dari BPDASHL Indragiri Rokan KLHK untuk ditanam warga Tobekgodang, dan tumbler sebagai bentuk edukasi pengurangan sampah plastik. Pemberian bibit dan tumbler ini juga bagian dari aksi mitigasi perubahan iklim seperti pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi penguatan kelembagaan Proklam di Kelurahan Tobekgodang

Sosialisasi penguatan kelembagaan Proklam kemudian dilanjutkan secara daring atau *online*, dengan penyelenggara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning pada tanggal 1 April 2021. Lurah Tobekgodang hadir sebagai narasumber, bersama dengan Direktur Adaptasi Perubahan Iklim dan Kasubdit Adaptasi Ekologi Buatan KLHK. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 200 peserta dari berbagai institusi, baik pemerintah, swasta, LSM, Mahasiswa, maupun masyarakat.

3. Pendampingan Penguatan Kelembagaan Secara Administratif

Kegiatan pendampingan penguatan kelembagaan secara administratif bertujuan agar Kampung Iklim Tobekgodang dapat memiliki akses pada kebijakan bantuan Proklam dari KLHK, dan berlangsung selama lebih kurang dua bulan (Maret-April 2021). Melalui penguatan kelembagaan, masyarakat diharapkan dapat mengakses kebijakan yang bersifat finansial ataupun non finansial yang bisa memenuhi target kerja bersama (Yuniati et al., 2017). Pendampingan juga dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas penggerak Proklam Tobekgodang yang nantinya akan berafiliasi langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Siwiyanti, L., Amal M, Khairul., Lestari N, 2021). Hasil dari kegiatan pendampingan secara administratif ini berhasil meloloskan Kelurahan Tobekgodang sebagai salah satu kelurahan yang menerima bantuan Proklam dalam bentuk dukungan peralatan sampah dari KLHK tahun anggaran 2021.

4. Pelatihan dan Bantuan Proklam

Kelurahan Tobekgodang menjadi satu dari enam kelompok penerima bantuan peralatan sampah untuk aksi mitigasi perubahan iklim. Bantuan dari Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) KLHK didahului dengan pemberian pelatihan pada tanggal 5 April 2021 di Pekanbaru. Selanjutnya secara simbolis bantuan Proklam diserahkan langsung oleh Menteri LHK Siti Nurbaya kepada Lurah Tobekgodang Yasir Arafat dalam kunjungan kerjanya ke Kota Dumai, pada tanggal 11 April 2021. Adapun jenis bantuan Proklam yang diterima berupa satu unit sepeda motor sampah roda tiga, alat komposter, pencacah organik, alat biopori, dan gerobak sampah. Pelatihan dan penyerahan bantuan Proklam terlihat dalam Gambar 3.



Gambar 3. Penyerahan Bantuan Proklam oleh Menteri LHK pada Lurah Tobekgodang, Kegiatan pelatihan peralatan Proklam, dan pemanfaatan bantuan untuk aksi mitigasi perubahan iklim di Kelurahan Tobekgodang

5. Monitoring dan Evaluasi

Dari hasil monitoring selama lebih kurang tiga bulan mendampingi Kampung Iklim Kelurahan Tobekgodang, kegiatan pengabdian masyarakat ini disambut antusias penggerak Proklam. Kegiatan sosialisasi SRN-PPI yang bermula dari Kelurahan Tobekgodang, meluas ke Kelurahan, Kecamatan, bahkan Kabupaten lainnya di Provinsi Riau. Kendala selama pengabdian hanya pada kesempatan pendampingan secara tatap muka, dikarenakan kondisi pandemi Covid-19. Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi daring seperti video call dan zoom meeting. Dari evaluasi kegiatan setelah pengabdian (post test), para penggerak Kampung Iklim Tobekgodang sebanyak 100 % menjawab pernah mendapatkan sosialisasi mengenai Program Kampung Iklim (Proklam), dari yang sebelumnya (pre test) menjawab tidak pernah mendapatkannya. Para penggerak Proklam menjadi lebih paham tentang pentingnya penguatan kelembagaan Proklam, dan mendapatkan manfaat peningkatan kualitas SDM dalam hal administratif penguatan kelembagaan Proklam.

Dari pertanyaan pre test, sebelumnya penggerak Proklam Tobekgodang tidak pernah mendapatkan bantuan sarana prasarana pendukung Proklam

dari pemerintah (KLHK), dan kini mereka mendapatkan manfaat dari bantuan yang diterima hasil dari pendampingan. Selain itu setelah kegiatan pelatihan yang diberikan, penggerak Proklam Tobekgodang menjadi tahu dari semula tidak tahu terkait penggunaan peralatan pendukung Proklam. Dukungan pemerintah tidak mesti harus berupa alokasi dana, hal penting lainnya adalah dukungan dalam bentuk fasilitas, pelatihan dan promosi (Notonegoro, 2020). Dukungan dalam bentuk apapun dari pemerintah, memiliki arti penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas lingkungan hidupnya.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian ini diberikan kepada kelompok Kampung Iklim Kelurahan Tobekgodang, yang dalam hal ini penggerak utamanya dipimpin langsung oleh Lurah, bersama dengan Ketua RW dan RT. Berdasarkan permasalahan yang ada terkait lemahnya kelembagaan Proklam, serta kurangnya sarana prasarana pendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, maka telah dilakukan sosialisasi, pendampingan dan pelatihan. Adapun hasil dari pengabdian ini meningkatkan pemahaman individu dan para pihak terkait kegiatan Proklam, peningkatan pemahaman secara administratif mengisi Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) KLHK untuk legalitas Proklam, serta keberhasilan Kelurahan Tobekgodang membuka akses pada kebijakan Proklam dengan memiliki sarana prasarana pendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim disertai dengan peningkatan keterampilan penggunaannya.

Pendampingan pada Kampung Iklim Tobekgodang ini masih memerlukan dukungan dari para pihak, baik pemerintah, dunia usaha, ataupun kalangan akademisi, sehingga pencapaian yang sudah didapat Kelurahan Tobekgodang dapat berkelanjutan. Adapun saran diperlukan pelatihan dan pendampingan lebih lanjut agar sertifikat Proklam dapat menjadi trophy di tingkat Nasional, sehingga modal dasar yang sudah dimiliki Kelurahan Tobekgodang dapat semakin berkontribusi mewujudkan masyarakat berketahanan iklim di tingkat tapak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada pimpinan dan jajaran Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning, yang telah memberikan dukungan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Selain itu ucapan terimakasih atas kerjasama yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemrov Riau, Pemko Pekanbaru, Para Camat, Lurah, RW, RT, LSM, Komunitas Lingkungan, dan para pihak lainnya yang telah membantu terlaksananya kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Afni, Z., Sari F Merian, & P. (2021). Pendampingan Masyarakat Ekowisata Mangrove Sungai Bersejarah (MSB) Kayu Ara Permai Melalui Kebijakan Padat Karya di Masa Pandemi Covid-19. *Community Empowerment*, 6(1).
- Afni, Z. (2021). Koreksi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia-Analisis Kepemimpinan Transglobal Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. In J. A. Hakim, D. Triono (Ed.), *Buku Literatur*. Damana Hikmaya.
- Bambang Sueprijanto. (2014). *Hutan untuk Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berkepribadian*. Wana Aksara.
- Faedlulloh, D., Irawan, B., & Prasetyanti, R. (2019). Program unggulan kampung iklim (proklam) berbasis pemberdayaan masyarakat. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1). <https://doi.org/10.26905/pjiap.v4i1.2364>
- Ghina, N. Y., & Zunariyah, S. (2017). Kampung Iklim : Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 32(2).
- Krisnawansyah, Y., Ediana, D., Fatma, F., Yuniliza, Y., Ekawandani, N., Faujiah, F., Rum, A. I., Mesin, T., Bandung, P. T., Darusmanl, H. Y., Mumu, H., Hamdan, A., Hugo Aries Suprpto, Muhammad Rusdi, P., Berdasarkan, S., No, U. U., Dpr, K., Ri, M. P. R., Gatot, J., Senayan, S., ... Tunggadewi, U. T. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Reuse Reduce Recycle di Kabupaten Solok. *Thesis*, 1(2).
- Legionosuko, T., Madjid, M. A., Asmoro, N., & Samudro, E. G. (2019). Posisi dan Strategi Indonesia dalam Menghadapi Perubahan Iklim guna Mendukung Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(3). <https://doi.org/10.22146/jkn.50907>
- Mardika, P. A., Sarwadi, A., & Pramono, R. W. D. (2018). Community Empowerment In Serut Village On Climate Change Adaptation And Mitigation. *Jurnal Teknosains*, 6(2). <https://doi.org/10.22146/teknosains.37167>
- Mashur, D., & Meiwanda, G. (2019). Adaptation And Mitigation Of Climate Change Based On Community Empowerment. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1). <https://doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.25-32>
- Notonegoro, M. R. (2020). Tahapan Komunikasi Partisipatif Dalam Proses Pengelolaan Wisata Underwater Desa Bangsring (Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(6). <https://doi.org/10.29244/jskpm.v4i6.737>
- Perdinan, P. (2020). Perubahan Iklim Dan Demokrasi: Ketersediaan Dan Akses Informasi Iklim, Peranan Pemerintah, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Implementasi Adaptasi Perubahan Iklim Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.87>
- R. Renaldo Manulu, & Bhayu Rhama. (2021). PENGUATAN KELEMBAGAAN LOKAL (Sinergitas Balai Taman Nasional dengan Masyarakat Kelurahan Habaring Hurung dalam Mengelola Kawasan Taman Nasional Sebangau). *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 6(2). <https://doi.org/10.37304/jispar.v6i2.416>
- Siwiyanti, L., Amal M, Khairul., Lestari N, A. (2021). Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 5(3). <https://doi.org/10.31764/jmm.v5i3.4413>
- Sudarwanto, S., Tjoneng, A., & Suriyanti, S. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklam) Di Desa Poleonro Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. *AGROTEK: Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian*, 4(2), 52–64. <https://doi.org/10.33096/agrotek.v4i2.132>
- Yuniati, S., Susilo, D., & Albayumi, F. (2017). Penguatan Kelembagaan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tebu. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017)*,

(ISBN: 978(2016).

Zuhdi, S., Ferizko, A., & Melinda, P. (2020). Penguatan Kelembagaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 3(1). <https://doi.org/10.24198/jmpp.v3i1.23683>